PENGADILAN TINGGI
GORONTALO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

LKjIP

LAPORAN KINERjA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

LKjIP Adalah Wujud Pertanggungjawaban Para Pejabat maupun yang dibawahnya terhadap masyarakat / public tentang kinerja Instansi selama satu tahun anggaran yang memuat laporan yang membandingkan target yang direncanakan dan hasil

LKjIP PENGADILAN TINGGI GORONTALO

TAHUN 2019

FEBRUARI TAHUN 2020

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
DHARMMAYUKTI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah kami Tim panjatkan pada kehadirat Allah Subhanallahu Wataala, atas dimudahkan dan dilancarkan, pada kami dalam menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2019, dan dapat diselesaikan dengan baik dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan LKjIP tahun 2019 sebagai dasar dalam mengevaluasi dan menilai suatu pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahunan yang di integritasikan bersama Perjanjian Kinerja Tahunan oleh setiap Pimpinan maupun Karyawan dan Karyawati Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam demi mewujudkan suatu Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan dari suatu Instansi. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP tahun 2019 Pengadilan Tinggi Gorontalo ini masih berdasarkan Renstra 2015-2019 yang setiap tahunnya telah di review.

Dasar dari LKjIP ini memuat suatu informasi dari pengukuran capaian kerja dari target rencana kerja tahunan dan dibuktikan pada realisasi dari penetapan kinerja pada tahun 2019, dengan melalui proses analisis kinerja dari masing masing yang tertuang pada Indikator Kinerja Tahunan dengan harapan Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat meningkatkan Kinerja demi mencapai sasaran dan tujuan strategis yang menjadi dasar suatu instansi mewujudkan wilayah zona Integritas yang bebas dari korupsi dan kolusi.

Isi dari Laporan Kinerja Kami Tim penyusun LKjIP ini telah melakukan suatu perubahan perubahan yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja dan kami sangat berharap perubahan ini bisa meningkatkan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2019 dapat diharapkan bisa menjadi dasar penilaian kinerja dari masing-masing Sumber Daya yang ada.

Gorontalo, Januari 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H

Nip. 19540221 198403 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2019 adalah suatu hasil dari pencapaian yang telah ditargetkan pada tahun yang sama yang dituangkan pada LKjIP ditahun 2019 dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Seperti diketahui Pengadilan Tinggi Gorontalo masih mempunyai visi dan misi yang sama dari tahun ke tahun yaitu " *Terwujudnya Pengadilan Tinggi Gorontalo Sebagai Peradilan Yang Agung*" bisa diwujudkan dengan baik ditahun 2019 ini dan tahun sebelumnya dengan berdasarkan RENSTRA ditahun 2015-2019.

Pada tahun 2019 ini telah mengalami peningkatan dalam pelayanan baik itu secara online maupun langsung lewat meja Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PTSP), dan kami di Instansi masih berupaya melakukan perbaikan pada zona Integritas di tujuh Area, dan 3 Pengadilan Negeri yang ada dibawah Pengadilan Tinggi Gorontalo dari empat satker yang ada, yaitu Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Marissa, karena pada tahun 2019 ini Pengadilan Negeri Gorontalo telah berhasil dalam mewujudkan zona integritas yang WBK dan WBBM, tapi ini tidak menjadi kepuasan bagi kami di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Karena tiap tahun ini akan menjadi penilaian dari Mahkamah Agung dan Instansi yang terkait.

Untuk mewujudkan suatu visi dan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo, pimpinan beserta jajarannya dan para staf saling kerja sama dengan dimulai dari penandatanganan pakta integritas dengan perjanjian kinerja tahun 2019. Pakta integritas dan Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani merupakan dasar dan langkah instansi untuk melaksanakan apa yang tertuang pada isi dari perjanjian

tersebut, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dibuktikan nyata pada pencapaian kinerja masing-masing. Dengan sistem pelayanan secara elektronik dan online dapat diharapkan pimpinan, pejabat, maupun staf Pengadilan Tinggi Gorontalo bisa mengimplementasikan kinerja yang baik, yang santun dan berwibawa terutama pada pencari keadilan, demi perwujudan visi dan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Bagan dibawah ini menunjukan suatu Misi dan Tujuan dari Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan 7 sasaran strategis dan 11 Indikator Kinrja :

Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo :

1. **Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo**
2. **Memberkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**
3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Gorontalo**
4. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Gorontalo**

7 sasaran strategis & 11 IKU dengan bertujuan :

Tujuan

1. **Terwujudnya kemandirian badan peradilan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.**
2. **Tercapainya Jangkauan Transparansi Pelayanan Badan Peradilan**
3. **Terciptanya kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia badan peradilan yang berkualitas dalam peningkatan kepastian hukum.**

Bagan 1. Misi dan Tujuan

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
I. LATAR BELAKANG	1
II.TUGAS DAN FUNGSI	2
III.STRUKTUR ORGANISASI	4
IV.SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A.RENCANA STRATEGIS 2019	11
1.VISI DAN MISI	11
2.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
3.INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
4.PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	16
B.RENCANA KINERJA TAHUN 2019	17
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018	22
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	24
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN	47
BAB IV. PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja.....	14
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	18
Tabel 3. Penetapan Kinerja.....	19
Tabel 4. Hasil Pengukuran Kinerja.....	22
Tabel 5. Hasil Analisis Sasaran 1 IKU1	28
Tabel 6. Hasil Realisasi 3 tahun terakhir sasaran 1 IKU 1.....	28
Tabel 7. Hasil Analisis Sasaran 1 IKU 2	29
Tabel 8. Hasil Realisasi 3 tahun terakhir sasaran 1 IKU 2.....	29
Tabel 9. Hasil Analisis Sasaran 1 IKU 3.....	30
Tabel 10 Hasil Realisasi 3 tahun terakhir sasaran 1 IKU 3.....	33
Tabel11. Hasil Analisis Sasaran 2 untuk perkara kasasi.....	31
Tabel12. Hasil analisis sasaran 2 untuk perkara PK.....	32
Tabel13. Hasil Realisasi 3 tahun terakhir untuk sasaran 2.....	32
Tabel14. Daftar data jumlah perkara untuk analisis sasaran 2.....	33
Tabel15. Hasil Sasaran 3 IKU 1.....	34
Tabel16. Hasil Analisis Realisasi 3 tahun terakhir sasaran 3 IKU 1.....	35
Tabel17. Hasil Analisis Sasaran 3 IKU 2.....	36
Tabel18. Hasil analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 3 IKU 2.....	36
Tabel19. Hasil Analisis Sasaran 3 IKU 3.....	37
Tabel 20 Hasil Analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 3 IKU 3.....	37
Tabel 21 Hasil Analisis Sasaran 4 IKU 1.....	38
Tabel 22. Hasil analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 4 IKU 1.....	38
Tabel.23. Hasil Analisis Sasaran 4 IKU 2.....	39
Tabel.24 Hasil Analisis Realisasi 3 tahun terakhir sasaran 4 IKU 2.....	39
Tabel.25. Hasil Analisis Sasaran 5 IKU 1.....	40
Tabel.26. Hasil Analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 5 IKU 1.....	41

Tabel.27. Hasil Analisis Sasaran 5 IKU 2.....	41
Tabel.28. Hasil Analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 5 IKU 2.....	42
Tabel.29. Hasil analisis Sasaran 6.....	43
Tabel.30 Daftar analisis IKU realisasi pengadaan sarana dan prasarana.....	43
Tabel.31. Hasil Analisis Sasaran 7.....	45
Tabel.32 Daftar Analisis IKU Sasaran 7.....	46
Tabel.33.Realisasi Anggaran Belanja tahun 2019 Dipa 01.....	48
Tabel.34.Rincian Belanja Pegawai tahun 2019 Dipa (01) BUA.....	48
Tabel.35. Rincian belanja Barang Tahun 2019 Dipa 01 BUA.....	49
Tabel.36. Rincian belanja Modal Tahun 2019 Dipa 01 BUA.....	51
Tabel.37. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2019 Dipa 03 Badilum.....	51
Tabel.38. Rincian belanja Barang Tahun 2019 Dipa 03 Badilum.....	52
Tabel.39. Realisasi Anggaran Per program Tahun 2019.....	53

BAGAN 1. Misi Pengadilan Tinggi Gorontalo.....	12
BAGAN 2. Tujuan Pengadilan Tinggi Gorontalo.....	12
BAGAN 3. Sasaran Pengadilan Tinggi Gorontalo.....	15
LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PT.GORONTALO	
LAMPIRAN 2. SK TIM SAKIP	

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
DHARMMAYUKTI

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Gorontalo salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004, diresmikan pada tanggal 28 Februari 2005.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo berada sama dengan wilayah di pemerintahan Provinsi Gorontalo yaitu membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri yaitu (1) Pengadilan Negeri Gorontalo, (2) Pengadilan Negeri Limboto (3) Pengadilan Negeri Tilamuta (4) Pengadilan Negeri Marisa, dimana pembentukan Pengadilan Negeri Bone bolango sudah mempunyai lokasi yang telah ditentukan tapi masih sementara proses administrasi di pusat dan Pengadilan Negeri Gorontalo Utara masih dalam proses pengusulan.

Di Pengadilan Tinggi Gorontalo setiap sumber daya yang ada, yang telah terikat janji di pakta integritas dan perjanjian kinerja mempunyai tugas kerja yang harus diselesaikan. Dalam menjalankan kinerja, masing-masing bagian yang terdiri dari bagian Kepaniteraan dan bagian kesekretariatan mempunyai garis tugas dan fungsi yang berbeda, tapi dalam keseluruhannya Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai masalah dan kendala umum dalam operasional tugas dan fungsi yang masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu :

- Staf yang ada di Pengadilan Tinggi Gorontalo telah dilakukan roling ruangan tapi masih belum sesuai dengan disiplin ilmu.
- Masih ada Pimpinan persub bagian yang belum menguasai tugas tupoksi dari stafnya, masih ketergantungan pada stafnya. Terutama dalam mengoperasikan aplikasi yang ada hubungan dengan kinerja pimpinan.
- Masih ada hubungan antara sesama staf atau antara staf dan pimpinan sub bagian yang kurang baik karena kesalahpahaman dan ini bisa mengganggu hubungan kerja.

II. TUGAS DAN FUNGSI

tugas utama dari Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam perkara banding yaitu menerima perkara banding dari Pengadilan Negeri, memeriksa, dan memutuskan menyelesaikan perkara banding yang diajukan.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagai sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya. Adapun tugas pokok dan kewenangan dari Pengadilan Tinggi yaitu :

1. Mengadili perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya;
3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas serta tingkah laku aparat pengadilan termasuk Hakim;
4. Mengawasi jalannya peradilan oleh Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya;
5. Melayani dan melaksanakan pengambilan sumpah untuk para calon Advokat yang telah dilantik oleh organisasi advokat.

Fungsi

Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah pengadilan tingkat banding yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Peradilan / mengadili** (*judicial power*);

   Menurut undang-undang no. 5 tahun 2005 fungsi peradilan adalah memeriksa dan mengadili, dan memutus perkara-perkara yang dari pengadilan tingkat pertama jika dalam putusan belum terdapat kepuasan atau keadilan.

2. **Fungsi Pembinaan** ;

   Yang dimaksud adalah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, administrasi baik peradilan, menyangkut maupun teknik administrasi yustisial, umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. **Fungsi Pengawasan** ;

   Sesuai UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Tinggi Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4. **Fungsi Administratif** ;

   Yang dimaksud disini adalah Penyelenggaraan dalam administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

III. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Gorontalo diatur berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2014. Struktur Organisasi adalah bagan yang menunjukkan tugas dan fungsi dari tiap-tiap bagian, dan secara garis besar struktur ***organisasi dari Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat di lihat pada lampiran;***

Keterangan dari struktur organisasi dapat dilihat pada pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing yang di rinci sebagai berikut :

1. Ketua

Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai tugas membina , mengkoordinasi dan memimpin dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang unit kerja.

2. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Menggantikan Ketua bila berhalangan serta Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. Tugas Hakim

1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
3. Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

⌘ KEPANITERAAN

4. panitera

1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2) Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
3) Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

5) Membuat akta dan salinan putusan.
6) Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
7) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Panitera Muda

1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan unitnya masing-masing.

6. Panitera Pengganti

mempunyai tugas Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

⌘ KESEKRETARIATAN

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN pada Bagian Ketiga menyangkut Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dalam hal ini mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsinya menerangkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

7. Sekretaris

Bertugas Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Sekretaris yang memimpin ke-Sekretariatan Pengadilan Tinggi dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bagian yang masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dimana pada masing masing bagian terbagi 2 (dua) Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang tugas mereka dijelaskan dibawah ini.

8. Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian,

bertugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Kepala Bagian yang dibantu oleh dua orang Kepala Sub Bagian dan staf pada tiap Sub Bagian :

a. Sub Bagian Perencanaan Program Dan Anggaran,

bertugas dan berfungsi untuk:

1. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
2. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Tata Laksana Dan Teknologi Informasi

bertugas dan berfungsi untuk:

1. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
2. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
3. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik;

9. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Kepala Bagian yang dibantu oleh dua orang Kepala Sub Bagian dan staf pada tiap Sub Bagian.

a. Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat,
2. kearsipan dan penggandaan
3. perawatan dan pemeliharaan
   * gedung,
   * sarana dan prasarana,
   * perlengkapan,
4. pengelolaan perpustakaan,
5. koordinasi keamanan lingkungan kantor,
6. keprotokolan dan hubungan masyarakat

b. Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan

mempunyai tugas dan fungsi :

1) melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi,
2) pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan,
3) pelaksanaan pemantauan,
4) serta penyusunan laporan.

IV. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Seluruh data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam tahun 2019 merupakan hasil pencapaian dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan bentuk sajian seperti berikut :

KATA PENGANTAR

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN, Menguraikan penjelasan umum tentang Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisikan tentang :

a. **Latar Belakang**
b. **Tugas Dan Fungsi**
c. **Struktur Organisasi**
d. **Sistematika Penyajian**

BAB II PERENCANAAN KINERJA, Menguraikan ikhtisar perencanaan kinerja, yang berisikan tentang :

a. **Rencana Strategis 2019**
b. **Rencana Kinerja Tahun 2019**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, Menguraikan pengukuran perbandingan antara target dan realisasi Kinerja tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Yang terdiri dari :

a. **Pengukuran Kinerja**
b. **Analisis Akuntabilitas Kinerja**
c. **Akuntabilitas Keuangan**

BAB IV PENUTUP

Bab yang menguraikan :

1. **Kesimpulan**
2. **Saran-saran**

LAMPIRAN

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
DHARMMAYUKTI

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2019

Pada Penyusunan Perencanaan Kinerja pada tahun 2019 telah dibuat pada awal tahun 2019 pada penyusunan LKjIP tahun 2018. Rencana Strategis tahun 2019 adalah akhir dari RENSTRA 2015-2019 yang merupakan perencanaan 5 tahun sebagai tolak ukur dalam penyusunan LKjIP 2015 sampai dengan LKjIP 2019.

Pada tahun 2019 RENSTRA sedikit di reviuw pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang berpatokan pada olah hasil dan analisa hasil realisasi per indikator kinerja yang harus dilaksanakan para Pimpinan dan pejabat Pengadilan Tinggi Gorontalo serta staf sesuai Perjanjian Kinerja yang telah di sepakati dan ditanda tangani.

1. VISI DAN MISI

VISI adalah suatu Gambaran yang akan dituju oleh suatu instansi, di mana di Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai visi **"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI GORONTALO SEBAGAI PERADILAN YANG AGUNG"**

Dari Visi tersebut suatu lembaga mempunyai suatu tugas yang harus dikerjakan oleh suatu instansi dalam mencapai suatu tujuan yang dinamakan dengan ***MISI.*** Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai Misi :

MISI

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Gorontalo
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Gorontalo

BAGAN 1. MISI PENGADILAN TINGGI GORONTALO

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dilakukan suatu instansi untuk pencapaian suatu hasil. Dimana Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai Tujuan :

Tujuan

1. **Terwujudnya kemandirian badan peradilan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyrakat pencari keadilan**
2. **Tercapainya jangkauan transparansi pelayanan badan peradilan.**
3. **Terciptanya kepemimpinan dan SDM badan peradilan yang berkualitas dalam peningkatan kepastian hukum**

BAGAN 2. TUJUAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SASARAN merupakan penjabaran dari suatu tujuan suatu instansi yang telah menunjukan hasil. Dimana Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai sasaran :

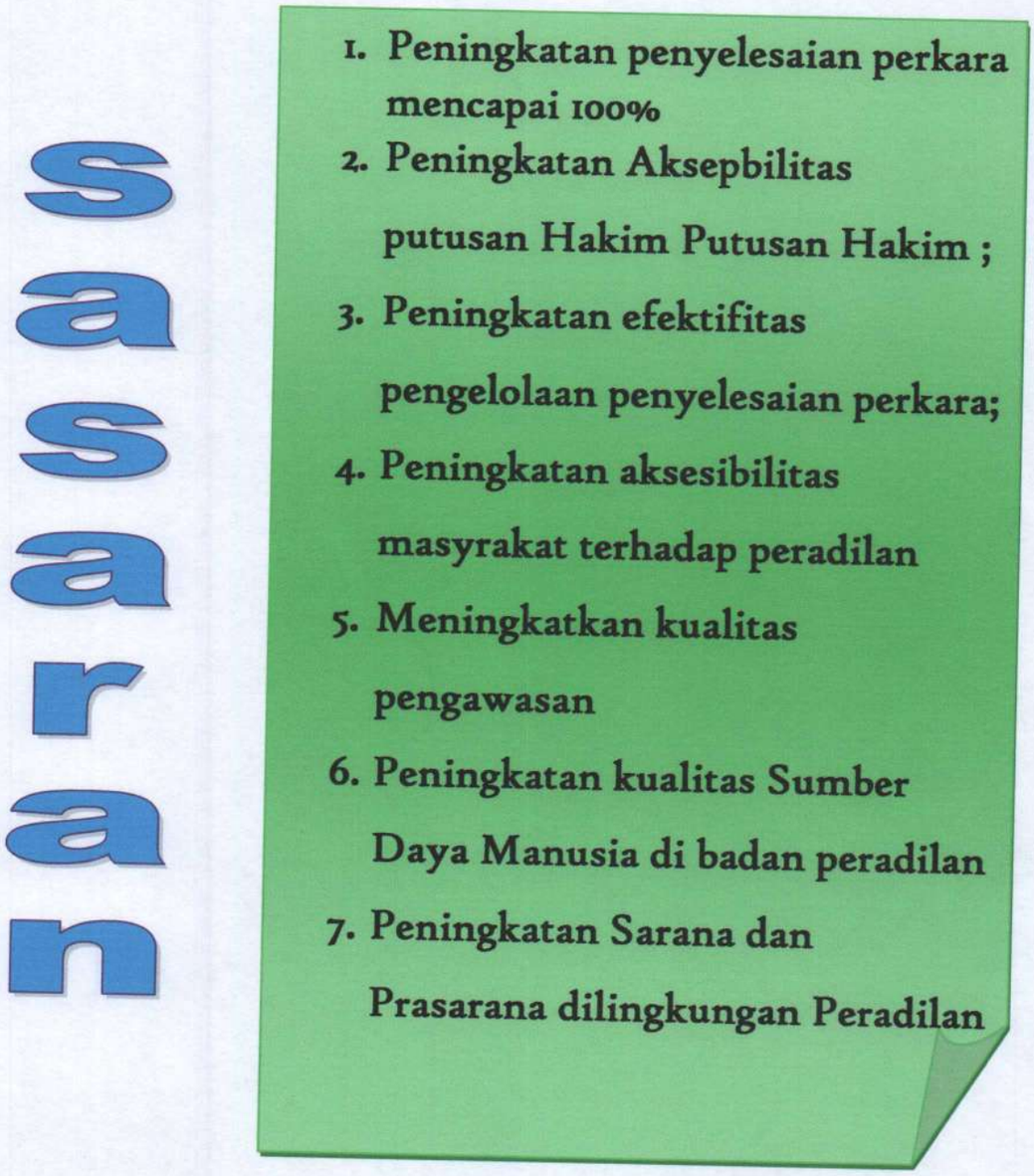

BAGAN 3. SASARAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA merupakan dasar ukuran baik kualitatif maupun kuantitatif yang menggambarkan pencapaian suatu tujuan dan sasaran suatu instansi. Dimana Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai Indikator Kinerja Utama sbb :

Tabel I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum	Jumlah perkara yang putus dikurangi upaya hukum(kasasi/PK) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen
3. Persentase berkas yang	Perbandingan antara berkas yang

diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	diajukan banding yang lengkap (terdiri bundel A dan bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas yang didistribusikan ke Majelis
Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
4. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk
Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi
5. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah perngaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

6. Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang Operasional Peradilan (lap.penyerapan anggaran belanja modal)	Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional kantor
7. Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran. (Laporan penyerapan Anggaran	Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan operasional kantor

4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

PROGRAM UTAMA adalah suatu unsur Inti dari kegiatan. Sedangkan **KEGIATAN POKOK** adalah suatu aktivitas utama berdasarkan program utama.

Dimana Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai Program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2019 yang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sbb:

1. **Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

   Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

   a. **Peningkatan penyelesaian perkara**
   b. **Peningkatan aksebilitas putusan hakim**
   c. **Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**
   d. **Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.**

2. **Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan pokok dari organisasi.**

   Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

   a. **Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan**
   b. **Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan.**

3. **Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA**

   Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

   a. **Peningkatan Kualitas Pengawasan**
   b. **Peningkatan Kualitas SDM**

B. RENCANA KINERJA 2019

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan oleh instansi.

Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2019 telah membuat Rencana Kinerja tahunan yang memuat target yang akan dicapai di tahun 2019 yang telah dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan, yang telah dimasukkan pada LKjIP ditahun 2018, dan pada tahun 2019 akan direviuw hasil realisasi pencapaiannya, dan dari hasil ini akan menjadi tolak ukur untuk Rencana aksi Kinerja tahun 2020.

Tabel berikut adalah Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Gorontalo di tahun 2019

Tabel. 2

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
	3. Tipikor	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	
	1. Pidana	93,9%
	2. Perdata	77,4%
	3. Tipikor	80%
	c. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	
	1. Pidana	100 %
	2. Perdata	100 %
	3. Tipikor	100 %
Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum :	
	1. Kasasi	36,36%
	2. Peninjauan Kembali	88,88 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
	b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
	c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1:11
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
	b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%

Meningkatkan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	100% 100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana dilingkungan Peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang Operasional Peradilan (lap.penyerapan anggaran belanja modal)	100%
Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan.	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran. (Laporan penyerapan Anggaran	100%

A. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan dan kesepakatan kinerja antara pimpinan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ada di di Rencana kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3

PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%

	b. Persentase perkara yang diselesaikan	
	1. Pidana	93,9%
	2. Perdata	77,4%
	3. Tipikor	80%
	c. persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	
	1. Pidana	100 %
	2. Perdata	100 %
	3. Tipikor	100 %
2. Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum :	
	1. Kasasi	36,36%
	2. Peninjauan Kembali	88,88%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
	b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
	c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 11
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
	b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
5. Meningkatkan kualitas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%

pengawasan	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	100%
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana dilingkungan Peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang Operasional Peradilan (lap.penyerapan anggaran belanja modal)	100%
7. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan.	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran. (Laporan penyerapan Anggaran	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan :

Dipa 01 :Rp. 15.638.777.000,-

Dipa 03 :Rp. 90.550.000,-

Jumlah Realiasasi anggaran Kegiatan:

Dipa 01 :Rp. 15.476.128.481,- (98,96%)

Dipa 03 :Rp. 88.769.100,- (98,03%)

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
DHARMMAYUKTI

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran kinerja merupakan kualifikasi suatu efisiensi dan efektifitas suatu instansi dalam bentuk persentase pencapaian. Di Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam melakukan pengukuran kinerja tahun 2019 menggunakan rumusan yang sama dari tahun sebelumnya yaitu dengan cara **perbandingan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan penetapan target;**

$$\text{RUMUS CAPAIAN} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel. 4
Hasil Pengukuran Kinerja
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**Peningkatan penyelesaian perkara**	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		a. Pidana	100%	100%	**100%**
		b. Perdata	100%	100%	**100%**
		c. Tipikor	100%	100%	**100%**
		2. Persentase perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana	93,9%	92,18%	**98,16%**
		2. Perdata	77,4%	79,4%	**102,58%**
		3. Tipikor	80,0%	92,3%	**115,37%**

		3. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 **100%** **100%** **100%**
2	**Peningkatan *Acceptabillity* putusan Hakim**	Persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Kasasi 2. Peninjauan Kembali	 36,36% 88,88%	 56,12% 0%	 **154,34%** **0 %**
3	**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	**100%**
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Mejelis	100%	100%	**100%**
		c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1:11	1:12	**109,09%**
4	**Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	**0%**
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	**100%**
5	**Peningkatan kualitas pengawasan**	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	**100%**

		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	100%	100%	**100%**
6	**Peningkatan Sarana dan Prasarana dilingkungan Peradilan**	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang Operasional Peradilan (lap.penyerapan anggaran belanja modal)	100%	99,17%	**99,17%**
7	**Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan.**	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran. (Laporan penyerapan Anggaran	100%	99,37%	**99,37%**

Hasil pengukuran kinerja tahun 2019 Pengadilan Tinggi Gorontalo yang ditunjukan pada tabel diatas merupakan pencapaian yang real dari tiap tiap sasaran strategis yang di evaluasi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

❖ EVALUASI SASARAN STRATEGIS DAN IKU

Olah hasil yang didapat dari pengukuran kinerja tahun 2019 adalah proses dari menganalisa akuntabilitas kinerja, untuk di jadikan dasar evaluasi kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama.

Berikut adalah hasil dari Evaluasi dari analisis dari tiap-tiap sasaran strategis kinerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat di jabarkan secara kuantitas persentase sebagai berikut:

1. **Sasaran 1 Peningkatan Penyelesaian Perkara**

Indikator Kinerja Utama :

a) **Persentase Sisa perkara yang diselesaikan**

Dengan memakai analisis : **perbandingan *sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.***

b) **Persentase perkara yang telah di selesaikan**

Dengan memakai analisis :***perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan***

c) **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan**

Dengan memakai analisis : ***perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan.***

2. **Sasaran 2 Peningkatan Acceptability Putusan Hakim**

Indikator Kinerja Utama :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hakim

1. Kasasi

2. Peninjauan Kembali (PK)

Dengan memakai analisis: ***perbandingan jumlah perkara pidana, perdata, tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (PK) dengan jumlah perkara banding pidana, perdata, tipikor yang sudah putus***

3) **Sasaran 3 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator Kinerja Utama :

a) Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Dengan memakai analisis : ***perbandingan berkas (bundel A dan B) yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan banding.***

b) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Dengan memakai analisis : ***perbandingan berkas perkara yang diterima dikepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis.***

c) Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Dengan memakai analisis : ***perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk.***

4. **Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to Justice)**

Indikator Kinerja Utama :

a) Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan

Dengan memakai analisis : ***Perbandingan antara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.***

b) Persentase Proses Penyelesaian perkara yang dapat

Dengan memakai analisis : ***Perbandingan antara proses perkara yang minutasi dipublikasikan diwebsite dengan perkara yang diminutasi.***

5. **Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to Justice)**

Indikator Kinerja Utama :

a) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindak lanjuti

Dengan memakai analisis : ***perbandingan pengaduan yang ditindak lanjuti dengan pengaduan yang dilaporkan.***

b) Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti.

Dengan memakai analisis ***perbandingan Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan.***

6. **Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Peradilan**

Indikator Kinerja Utama :

Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang Operasional Peradilan (lap.penyerapan anggaran belanja modal)

dengan memakai analisis : ***perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional perkantoran.***

7. **Peningkatan Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Peradilan.**

Indikator Kinerja Utama :

Persentase Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran). dengan memakai analisis : ***perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan operasional kantor.***

❖ HASIL ANALISIS EVALUASI KINERJA PERSASARAN STRATEGIS DAN IKU

Dalam mengolah data untuk mendapatkan hasil dari evaluasi kinerja dari 7 (tujuh) sasaran adalah menggunakan analisis kuantitatif yaitu *perbandingan dari realisasi 2019 dan target 2019 untuk memperoleh hasil capaian ditahun 2019.* Dan hasil realisasinya akan menjadi dasar dari target di tahun 2020

1) Sasaran 1 Peningkatan Penyelesaian Perkara

* **IKU Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Dari pendekatan rumus kuantitatif diatas maka dapat dijabarkan pada table analisis berikut ini:

Tabel 5.

Hasil Analisa Sasaran 1 IKU 1

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2018	Sisa Perkara yang diselesaikan	realisasi	target	capaian
1	Pidana	5	5	100%	100%	100%
2	Perdata	7	7	100%	100%	100%
3	Tipikor	1	1	100%	100%	100%

keterangan table: Realisasi = Sisa Perkara yang diselesaikan / sisa perkara tahun sebelumnya X 100%

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil realisasi sasaran 1 IKU 1 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel 6.

Hasil Realisasi 3 Tahun Terakhir Sasaran 1 IKU 1

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
	2017	2018	2019		
Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan					
a.Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
b.Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
c.Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

* **IKU Persentase perkara yang telah diselesaikan**

Dari pendekatan rumus kuantitatif diatas maka dapat dijabarkan pada table analisis berikut ini:

Tabel 7.

Hasil Analisa Sasaran 1 IKU 2

No	Jenis Perkara	Perkara 2019 + Sisa Perkara	Perkara yang diselesaikan	realisasi	target	capaian
1	Pidana	64	59	92,18%	93,9%	98,16%
2	Perdata	34	27	79.4%	77,4%	102,58%
3	Tipikor	13	12	92,3%	80%	115,37%

keterangan table: Realisasi = sisa perkara dan jumlah Perkara 2019 / Perkara Yang diselesaikan X 100%

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil Realisasi Sasaran 1 IKU 2 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel 8.

Hasil Realisasi 3 Tahun Terakhir Sasaran 1 IKU 2

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target (%)	Capaian (%)
	2017	2018	2019		
Persentase Perkara Yang diselesaikan a. Pidana	82,8	93,9	92,18	93,9	98,16
b. Perdata	84,2	77,4	79.4	77,4	102,58
c. Tipikor	100	80	92,3	80	115,37

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

*** IKU Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan**

Dari pendekatan rumus kuantitatif diatas maka dapat dijabarkan pada table analisis berikut ini:

Tabel 9. Hasil Analisis Sasaran 1 IKU 3

Nomor	Jenis Perkara	Perkara Yang diselesaikan jk waktu 3 bulan	Perkara yang harus diselesaikan jk waktu 3 bulan	realisasi	target	capaian
1	Pidana	5	5	100%	100%	100%
2	Perdata	7	7	100%	100%	100%
3	Tipikor	1	1	100%	100%	100%

Perkara yang dimaksud adalah sisa perkara yang belum diminutasi pada tahun 2018 dan telah diminutasi pada tahun 2019 dalam jangka waktu 3 bulan.(data sesuai pada aplikasi SIPP)

keterangan table: Realisasi = Perkara yang diselesaikan jk wkt 3 bulan / Perkara Yang harus diselesaikan dalam jk wkt 3 bulan X 100%

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil Realisasi Sasaran 1 IKU 3 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel 10.

Hasil Realisasi 3 Tahun Terakhir Sasaran 1 IKU 3

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target (%)	Capaian (%)
	2016	2017	2018		
Persentase Perkara Yang diselesaikan jangka waktu 3 bulan					
a. Pidana	100	100	100	100	100
b. Perdata	100	100	100	100	100
c. Tipikor	100	100	100	100	100

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

2) Sasaran 2 Peningkatan Penyelesaian Perkara

* IKU : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hakim
  1. Kasasi
  2. Peninjauan Kembali (PK)

Dari pendekatan rumus kuantitatif diatas maka dapat dijabarkan pada table analisis berikut ini:

Tabel 11.

Hasil Analisis Sasaran 2 untuk perkara Kasasi

Perkara kasasi	Jumlah Perkara Putus	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)

1.Pidana	59	26	46,06	36,36	126,67
2.Perdata	27	18	66,67	36,36	183,36
3.Tipikor	12	11	91,67	36,36	252,12

keterangan table: Realisasi = Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi / Jumlah Perkara yang putus X 100%

Tabel 12.
Hasil Analisis Sasaran 2
untuk perkara Peninjauan Kembali (PK)

Perkara PK	Jumlah Perkara Putus	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1. Pidana	59	0	0	88,88	0
2. Perdata	27	0	0	88,88	0
3. Tipikor	12	0	0	88,88	0

keterangan table: Realisasi = Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK/ Jumlah Perkara yang putus X 100%

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil Realisasi Sasaran 1 IKU 2 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel.13
Hasil Realisasi 3 Tahun Terakhir Untuk Sasaran 2
IKU : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target 2019 (%)	Capaian 2019 (%)
	2017	2018	2019		
- Persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	30,3	36,36	56,12	36,36	154,34
- Persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	30,3	88,88	0	88,88	0

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

Hasil dari realisasi diatas diperoleh dari perbandingan antara jumlah keseluruhan perkara yang telah diminutasi dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK. Dimana pada tahun 2019 dapat dirinci pada table sebagai berikut:

Tabel.14

Daftar Data Jumlah Perkara untuk Analisis Sasaran 2

Dengan IKU Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum Kasasi Dan PK

Tahun	Keadaan Perkara Pidana, Perdata, Tipikor					Realisasi (%)	
	Perkara Yang Putus	Perkara Kasasi yang diajukan	Perkara Tidak Mengajukan Kasasi	Perkara PK yang diajukan	Perkara Tidak Mengajukan PK	Kasasi	PK
2019	98	43	55	0	0	56,12	0

keterangan table: Realisasi = Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK/ Jumlah Perkara yang putus X 100%

3) Sasaran 3 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

*** IKU Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.**

Dari pendekatan rumus kuantitatif diatas maka dapat dijabarkan pada table analisis berikut ini:

Tabel.15

Hasil analisis sasaran 3 IKU 1

Jenis Perkara	Jumlah Berkas Perkara Banding	Berkas Perkara disampaikan lengkap	Realisasi (%)	Capaian (%)
Pidana	59	59	100	100

Perdata	27	27	100	100
Tipikor	12	12	100	100

keterangan table: Realisasi = Berkas Perkara yang disampaikan lengkap/ Jumlah berkas Perkara banding X 100%

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil Realisasi Sasaran 3 IKU 1 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel.16

Hasil Analisis Realisasi 3 tahun terakhir untuk sasaran 3 IKU 1

Tahun	Keadaan Perkara Pidana, Perdata, Tipikor		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Berkas Perkara Banding	Berkas Perkara disampaikan lengkap			
2017	98	98	100	100	100
2018	102	102	100	100	100
2019	98	98	100	100	100

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

IKU Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Tabel. 17. Hasil analisis sasaran 3 IKU 2

Jenis Perkara	Berkas yang diterima di kepaniteraan	Berkas yang didistribusikan ke majelis	Realisasi (%)	Capaian (%)
Pidana	59	59	100	100
Perdata	27	27	100	100
Tipikor	12	12	100	100

keterangan table: Realisasi = Berkas yang didistribusikan ke majelis / Berkas yang diterima dikepaniteraan X 100%

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil Realisasi Sasaran 3 IKU 2 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel. 18

Hasil analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 3 IKU 2

Tahun	Keadaan Perkara Pidana, Perdata, Tipikor		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Berkas yang diterima di kepaniteraan	Berkas yang didistribusikan ke majelis			
2017	98	98	100	100	100
2018	102	102	100	100	100
2019	98	98	100	100	100

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

IKU Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Dari pendekatan rumus kuantitatif diatas maka dapat dijabarkan pada table analisis berikut ini:

Tabel. 19.

Hasil Analisis Sasaran 3 IKU 3

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Majelis Hakim	Ratio	Realisasi
1	Pidana	59	8	7	1:7
2	Perdata	27	7	3	1:3
3	Tipikor	12	6	2	1:2
Rata-rata		98	21	12	1:12

keterangan table: RATIO = Perkara Masuk / Jumlah Majelis Hakim

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil Realisasi Sasaran 3 IKU 3 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel. 20

Hasil analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 3 IKU 3

Tahun	Perkara Banding Masuk	Jumlah Majelis Hakim	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2017	98	14	100	100	100
2018	102	12	100	100	100
2019	98	12	100	100	100

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

4) Sasaran 4 Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to Justice)

IKU Persentase Berkas Prodeo Yang Diselesaikan

Dari pendekatan rumus kuantitatif diatas maka dapat dijabarkan pada table analisis berikut ini:

Tabel. 21

Hasil analisis sasaran 4 IKU 1

Berkas Prodeo Yang Masuk	Berkas Prodeo Yang diselesaikan	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
0	0	0	0	0

keterangan table: Realisasi = Berkas Prodeo yang diselesaikan / Berkas Prodeo Yang Masuk

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil Realisasi Sasaran 4 IKU 1 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel. 22.

Hasil analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 4 IKU 1

Tahun	Perkara Prodeo Masuk	Perkara Prodeo Yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

IKU Persentase Proses Perkara Yang dapat Dipublikasikan

Dari pendekatan rumus kuantitatif diatas maka dapat dijabarkan pada table analisis berikut ini:

Tabel. 23
Hasil analisis sasaran 4 IKU 2

Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Minutasi Yang diPublikasikan	Target (%)	Realisasi (%)
Pidana	59	59	100%	100%
Perdata	27	27	100%	100%
Tipikor	12	12	100%	100%

Keterangan Tabel : Realisasi = Perkara Minutasi Yang dipublikasikan / Perkara Masuk X 100

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil Realisasi Sasaran 4 IKU 2 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel.24
Hasil analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 4 IKU 2

Indikator Kinerja	*Realisasi (%)*			*Target 2019 (%)*	*Capaian 2019 (%)*
	2017	2018	2019		
Persentasi proses penyelesaian perkara minutasi yang dapat dipublikasikan.	100	100	100	100	100

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

5) Sasaran 5 Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (access to Justice)

*** IKU : Peningkatan Kualitas Pengawasan :**

a) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindak lanjuti
b) Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti.

Dari pendekatan rumus kuantitatif diatas maka dapat dijabarkan pada table analisis berikut ini:

a) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang ditindak lanjuti

Tabel.25

Hasil Analisis Sasaran 5 IKU 1

Pengaduan Masuk	Pengaduan Belum Ditindak lanjuti	Pengaduan Telah Ditindak lanjuti	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
3	-	3	100%	100%	100%

Keterangan Tabel : Realisasi = Pengaduan Yang Telah Ditindaklanjuti / Pengaduan Masuk

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil Realisasi Sasaran 5 IKU 1 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel.26

Hasil analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 5 IKU 1

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target 2019 (%)	Capaian 2019 (%)
	2017	2018	2019		
Persentasi Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	33,34	100	100	100	100

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

b) Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti.

Tabel.27

Hasil Analisis Sasaran 5 IKU 2

Kegiatan Pengawasan	Hasil Pengawasan Tidak Ditindak lanjuti	Hasil Pengawasan Telah Ditindak lanjuti	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2 Kegiatan	-	2 Laporan	100%	100%	100%

Keterangan Tabel : Realisasi = Hasil Pengawasan Yang telah ditindaklanjuti/ Kegiatan Pengawasan

Tabel berikut menunjukan penjabaran hasil Realisasi Sasaran 5 IKU 1 dalam 3 tahun terakhir :

Tabel.28

Hasil analisis realisasi 3 tahun terakhir sasaran 5 IKU 1

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target 2019 (%)	Capaian 2019 (%)
	2017	2018	2019		
Persentasi temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti	100	100%	100%	100%	100%

keterangan table: Capaian= Realisasi / Target x 100%

6) Sasaran 6 PENINGKATAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN PERADILAN

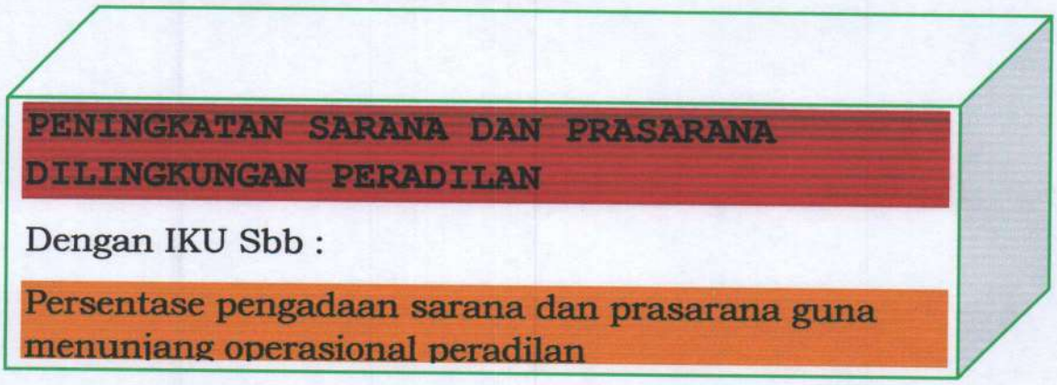

Bagan.4 Sasaran 6

* **IKU : Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Guna Menunjang Operasional Peradilan**

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai ***perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional perkantoran.***

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target juga di tentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan tahun 2018 yang terdiri dari: Target Indikator kinerja ini pada tahun 2018, sebagaimana di tetapkan pada melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada Tahun 2018 di tampilkan pada tabel berikut ini

Tabel. 29. Hasil Analisis Sasaran 6

IKU : Persentase Pengadaan Sarana Dan Prasarana Guna Menunjang Operasional Peradilan (belanja modal)

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2019	Thn 2019
Persentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	99,62 %	99.99 %	99,17%	100%	99,17%

Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2019 tersedia anggaran belanja modal sebesar Rp.108.500.00,- yang dilaksanakan untuk alat pengolah data pendukung SIPP Rp.104.000.000,- Pengadaan alat pengolah data pendukung e-court Rp.4.500.000,- , dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel.30. Daftar Analisis IKU
Realisasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
1	Alat Pengolah Data Pendukung SIPP	104.000.000,-	103.100.000,-	99,13	900.000,-

2	Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung e-court	4.500.000,-	4.500.000,-	100	0
Total Belanja Modal		**108.500.000,-**	**107.600.000,-**	**99,17%**	**900.000,-**

***Keterangan Tabel : Realisasi* = Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran**

7) Sasaran 7 PENINGKATAAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PERADILAN.

PENINGKATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PERADILAN

Dengan IKU Sbb :

Persentase Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran)

Bagan.5 Sasaran 6

*** IKU : Persentase Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan guna menunjang Operasional Perkantoran**

Indikator Kinerja ini di kuantitatifkan sebagai **perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan operasional kantor.** Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target juga di tentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 yang terdiri dari DIPA 01.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana di tetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian Indikator Kinerja ini tahun 2019 di tampilkan pada tabel berikut :

Tabel.31

Hasil Analisis Sasaran 7
IKU : Persentase Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Penyerapan Operasional Perkantoran

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran	99,42 %	99,19 %	99,37%	100%	99,37%

Pagu Anggaran Satuan kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2019 sebesar Rp.15.729.327.000,- (Lima belas milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) meliputi :

1. Pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk
   - Program Dukungan Manajemen Peradilan dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.15.530.277.000,-
   - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 108.500.000,- (Seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) Anggaran tersebut digunakan

untuk membiayai kegiatan operasional pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dan pengadaan sarana dan prasarana kantor.

2. Pagu DIPA (03) Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sebesar Rp.90.550.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi
   - Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dan telah terealisasi sebesar Rp.88.769.100,- sisa anggaran sebesar Rp.1.780.900,- (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) seperti di perlihatkan pada tabel di bawah ini :

Tabel.32 .
Daftar Analisis IKU
Realisasi Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Penunjang Operasional Kegiatan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	15.530.277.000,-	15.432.627.020,-	99,37	97.649.980,-
2	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	108.500.000,-	107.600.000,-	99,17	900.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	90.550.000,-	88.769.100,-	98,03	1.780.900,-
	JUMLAH	**15.729.327.000,-**	**15.628.996.120,-**	**99,36%**	**100.330.880,-**

***Keterangan Tabel : Realisasi* = Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran**

Berdasarkan data –data di atas maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 99,36 %. Capaian di peroleh dengan

membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja ini tercapai 99,36 %

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.15.729.327.000,- (Lima belas milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp.15.729.327.000,- (Lima belas milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) meliputi :

a. Belanja Pegawai : Rp.13.996.097.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah),

b. Belanja Barang : Rp.1.534.180.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

c. Belanja Modal : Rp.108.500.000,- (Seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan uang makan. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan dinas. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum

ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang operasional dan non operasioanal.

Tabel 33.
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	13.996.097.000,-	13.987.995.460,-	99,94	8.101.540,-
2	Belanja Barang	1.534.180.000,-	1.444.631.560,-	94,16	89.548.440,-
3	Belanja Modal	108.500.000,-	107.600.000,-	99,17	900.000,-
	Jumlah	**15.638.777.000**	**15.540.277.000,-**	**99,37%**	**98.549.980,-**

Berikut ini rincian tabel realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal DIPA 01 badan Urusan Administrasi :

Tabel 34.
Rincian Belanja Pegawai Tahun 2019
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**51**	**Pembayaran Gaji dan Tunjangan**	13.996.097.000,-	13.987.995.460,-	**99,94**
2	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.246.371.000,-	3.246.371.000,-	**100**
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.000,-	43.904,-	**97,96**
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	247.761.000,-	247.739.710,-	**99,99**

4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	51.116.000,-	51.103.662,-	**99,98**
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	93.920.000,-	93.920.000,-	**100**
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7.576.730.000,-	7.576.730.000,-	**100**
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.548.000.000,-	1.547.994.184,-	**100**
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	125.287.000,-	125.286.699,-	**100**
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	447.902.000,-	439.848.000,-	**98,20**
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	47.065.000,-	47.065.000,-	**100**
11	511157	Belanja Tunjangan kemahalan Hakim	261.900.000,-	261.900.000,-	**100**
12	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	350.000.000,-	350.000.000,-	**100**

Tabel 35.
Rincian Belanja Barang Tahun 2019
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	**1066.970**	**Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non Operasional)**	**164.057.000,-**	**155.953.600,-**	**95,06**
1	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.708.000,-	95.125.000,-	95,40
2	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.800.000,-	23.300.000,-	93,95
3	521211	Belanja Bahan	14.509.000,-	13.937.000,-	96,06

4	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.040.000,-	23.591.600,-	94,22
II	**1066. 994**	**Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**	**1.370.123.000,-**	**1.288.677.960,-**	**94,06**
4	521111	Belanja Keperluan perkantoran	403.381.000,-	346.979.380,-	86,02
5	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	56.281.000,-	55.492.750,-	98,60
6	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46.882.000,-	46.879.835,-	100
7	521114	Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat	10.218.000,-	10.150.600,-	99,34
8	522111	Belanja Langganan Listrik	143.808.000,-	143.802.479,-	100
9	522112	Belanja Langganan Telepon	11.250.000,-	11.221.155,-	99,74
10	522113	Belanja Langganan Air	3.300.000,-	3.158.000,-	95,70
11	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111.260.000,-	111.195.956,-	99,94
12	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.700.000,-	5.508.500,-	96,64
13	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.953.000,-	144.099.508,-	98,73
14	521115	Beban Honor Operasional	77.100.000,-	77.100.000,-	100

		Satuan Kerja			
15	522141	Beban Sewa	148.650.000,-	127.145.000,-	85,53
16	524111	Beban Perjalanan Biasa	203.140.000,-	202.894.797,-	99,88
17	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.200.000,-	3.050.000,-	95,31
Total Belanja Barang			**1.534.180.000,-**	**1.444.631.560,-**	**94,16**

Tabel 36.
Rincian Belanja Modal Tahun 2019
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Alat Pengolah Data Pendukung SIPP	104.000.000,-	103.100.000,-	99,13	900.000,-
2	Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung e-Court	4.500.000,-	4.500.000,-	100	0
Total Belanja Modal		**108.500.000,-**	**107.600.000,-**	**99,17%**	**900.000,-**

2. DIPA 03 (Dirjen Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA 03 berupa belanja barang sebesar Rp. 90.550.000,- (Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Digunakan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Tabel 37.
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019
DIPA (03) Badan Peradilan Umum

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Barang	90.550.000,-	88.769.100,-	98,03	1.780.900,-
JUMLAH		**90.550.000,-**	**88.769.100,-**	**98,03%**	**1.780.900,-**

Tabel 38
Rincian Belanja Barang Tahun 2019
DIPA (03) Badan Peradilan Umum

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	1049.005	**Perkara Peradilan Umum Yang Di selesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding Yang Tepat Waktu**	**55.550.000,-**	**53.869.100,-**	**97**
1	521211	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	17.117.000,-	16.712.200,-	97,64
2	521811	ATK	27.174.000,-	27.136.900,-	99,86
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.314.000,-	3.970.000,-	92,03
4	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.945.000,-	6.050.000,-	87,11
	1049.009	**Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara**	**35.000.000,-**	**34.900.000,-**	**100**
1	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.700.000,-	28.600.000,-	100
2	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000,-	6.300.000,-	100
Total Belanja Barang			**90.550.000,-**	**88.769.100,-**	**98,03%**

Realisasi Anggaran per Program

DIPA (01) di gunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA (03) di gunakan untuk melaksanakan 1 (satu) Program Kerja yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 39.
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019

NO	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	15.638.777.000,-	15.540.227.020	99,37	98.549.980,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	108.500.000,-	107.600.000,-	99,17	900.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	90.550.000,-	88.769.100,-	98,03	1.780.900,-
	JUMLAH	15.837.827.000,-	15.736.596.120,-	99,36%	101.230.880,-

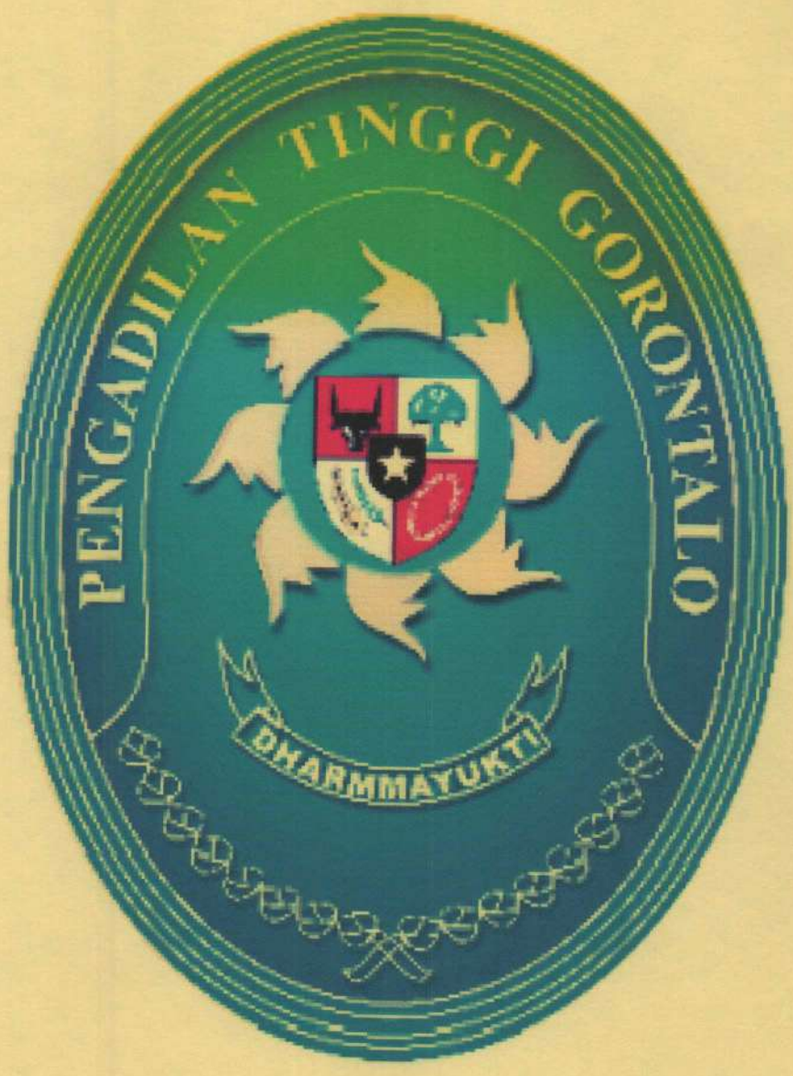
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
DHARMMAYUKTI

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahun 2019 adalah 5 tahun terakhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melakukan Evaluasi analisis kinerja berdasarkan RENSTRA 2015-2019, dimana selama 5 tahun terakhir ini Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam kinerja.

Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Gorontalo, masih terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) atau staf yang masih merangkap dalam melakukan tugas dan fungsi, itu dikarenakan kurangnya staf di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tapi ini semua tidak menghalangi staf maupun pimpinan dalam meningkatkan kinerja kami. pencapaian kinerja telah memenuhi target yang meningkat dari tahun sebelumnya, Secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan perjanjian kinerja tahunan 2019 yang telah ditandatangani oleh masing-masing pimpinan maupun sub pimpinan dan para staf Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Untuk itu di tahun 2020 Kami akan mengreviuw LKjIP tahun 2019 sebagai tolak ukur kami dalam membuat RENSTRA 2020-2024. Dalam mereviuw kinerja instansi Pengadilan Tinggi Gorontalo telah membuat suatu keberhasilan-keberhasilan yang cukup baik, dan di balik keberhasilan tersebut tetap Instansi masih mengalami kendala maupun hambatan.

Berikut hasil reviuw Pencapaian kinerja yang dilihat dari keberhasilan maupun kendala atau hambatan.

1) Pencapaian Keberhasilan

Dalam Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam evaluasi kinerjanya telah mencapai suatu keberhasilan yang sangat baik. Hasil dari analisis kinerja yang menunjukan suatu keberhasilan instansi dapat disimpulkan sebagai berikut

- ⌘ Sasaran penyelesaian sisa perkara ditahun 2019 telah memenuhi target 100 % , dan sasaran perkara yang harus diselesaikan ditahun berjalan dalam Penyelesaian perkara pidana dari yang ditargetkan 93,9% telah memenuhi lebih dari yang ditargetkan yaitu 98,16%, untuk perkara perdata dan tipikor masing-masing juga telah memenuhi target yaitu sampai mencapai 102,58% untuk Perdata dan 115,37% untuk Tipikor. Ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja dari instansi dalam hal penyelesaian perkara,
- ⌘ Pada tahun 2019 ini perkara yang diterima oleh kepaniteraan telah di input dengan tepat waktu dan sesuai SOP ke dalam aplikasi SIPP dan telah disetor ke Bagian Kepaniteraan Hukum Perkara Pidana sebanyak 54 Perkara dari 59 perkara masuk di tambah pidana anak 2 perkara, untuk perdata sebanyak 20 perkara dari 27 perkara masuk dan Tipikor sebanyak 11 perkara dari 12 perkara yang masuk. Ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dalam penyetoran berkas perkara minutasi dari jumlah perkara yang masuk.
- ⌘ Ditahun 2019 Penyelesaian Pengaduan telah diselesaikan dan telah dikirim ke BAWAS sesuai SOP, pengaduan yang masuk sebanyak 3 berkas dan telah ditindak lanjuti dengan baik tanpa di tunda dengan waktu yang lama. Ini adalah peningkatan dalam proses penyelesaian pengaduan yang masuk.

- ⌘ Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam realisasi anggaran dipa 01 dan dipa 03 mencapai 99,17 % dan 99,37% ini menunjukan pencapaian realisasi anggaran yang sangat baik untuk suatu program kegiatan .
- ⌘ Para Pemimpin dan Staf telah mengalami peningkatan dalam hal kinerja melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
- ⌘ Pengadilan Negeri Gorontalo suatu satker yang berada di wilayah hokum Pengadilan Tinggi Gorontalo telah berhasil mencapai Zona Integritas yang WBK dan WBBM.

2) Kendala / Hambatan

- ⌘ Ditahun 2019 ini, Pengadilan Tinggi Gorontalo para SDM dalam menjalankan suatu tugas dan fungsi mengalami suatu Kendala dan Hambatan pada mengoperasikan aplikasi online yang menunjang pekerjaan masing-masing, dan yang sering mengalami keterlambatan dalam mengelola aplikasi yang ada adalah para Panmud dikarenakan terlalu tergantung pada para stafnya.
- ⌘ Ditahun ini Pengadilan Tinggi Gorontalo belum berhasil dalam Zona Integritas ini yang menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan yang WBK dan WBBM. Tapi dalam tahun 2020 Pengadilan Tinggi Gorontalo memulai usaha dalam memperbaiki pelayanan untuk mencapai Zona Integritas yang WBK dan WBBM.

B. SARAN

Dalam penyusunan LKjIP ini Kami masih membutuhkan saran yang membangun demi peningkatan kinerja lebih baik lagi. Dan sangat diharapkan kerja sama yang baik antara pemimpin dan para staf dalam melakukan tugas dan fungsi, dan para panmud yang

belum lancar dalam mengoperasikan aplikasi online yang menunjang pekerjaan untuk bisa belajar dan tidak menggantung pada stafnya. Ini dimaksudkan untuk menunjukan bahwa Pimpinan-pimpinan di Pengadilan Tinggi Gorontalo pun layak dalam bidang teknologi terutama dalam kinerja berbasis Internet atau online.

Demikian kami tim penyusun dalam membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ditahun 2019, dengan harapan adalah 7 (tujuh) sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Kinerja yang berdasarkan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja 2019 dalam pencapaian kinerja sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan dari pencapaian target ini menjadi dasar kami dalam melakukan Zona Integritas (ZI) dan telah kami masukkan kedalam RENSTRA 2020-2024 dan Rencana Aksi Kinerja tahun 2020.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NOMOR : W20-U/1627/0T.01.2/12/2019

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

b. Bahwa untuk menindaklanjuti Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Pengadilan Tinggi Gorontalo membentuk Tim untuk menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam bentuk Surat Keputusan;

c. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tinggi GorontalO

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republ;ik Indonesia Nomor 4614) ;

b. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 1604/SEK/ot.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian dokumen SAKIP

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam jalur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Kedua : Nama- nama yang dimaksud dalam dictum 1 (satu) tersebut bertugas sebagai Tim Penilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 17 Desember 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

H. SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H.

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NOMOR : W20-U/ 1627 /OT.01.2/12/2019
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Suhairi Z, S.H.,M.H	Panitera	Ketua
2	Armin Jahja, S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua
3	Benny AY. Walukow, S.E	Kabag. Perencanaan dan kepegawaian	Sekretaris
4	Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, S.H.	Wapan	Anggota
5	Herdi Pakaya	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
6	Rasuna Junus, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
7	Hasni Van Gobel, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
8	Fony Uloli, S.H	Panmud Perdata	Anggota
9	Muh. Aldrin Malie, S.H.	Panmud TIPIKOR	Anggota
10	Fandry Yuniarti Karim, S.Kom.,M.H	Kassubag RT dan TU	Anggota
11	Deddy S. Botutihe, S.Kom	Kassubag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
12	Cilan Husain, S.Kom	Kassubag Kepegawaian dan TI	Anggota
13	Nurminaningsi Otoluwa	Kassubag Renprog dan Anggaran	Anggota
14	Nurafni saluwa, S.E.	Staf	Operator

15	Hijri Maharani Lebi, S.Kom	Staf	Operator
16	Santi Iswari, S.E	Staf	Operator
17	Vivien Novita Tahir, S.Akun	Staf	Operator
18	Zulham Djafar	Staf	Operator
19	Ivan Ombuh, S.E	Staf	Operator

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 17 Desember 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

H. SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI GORONTALO

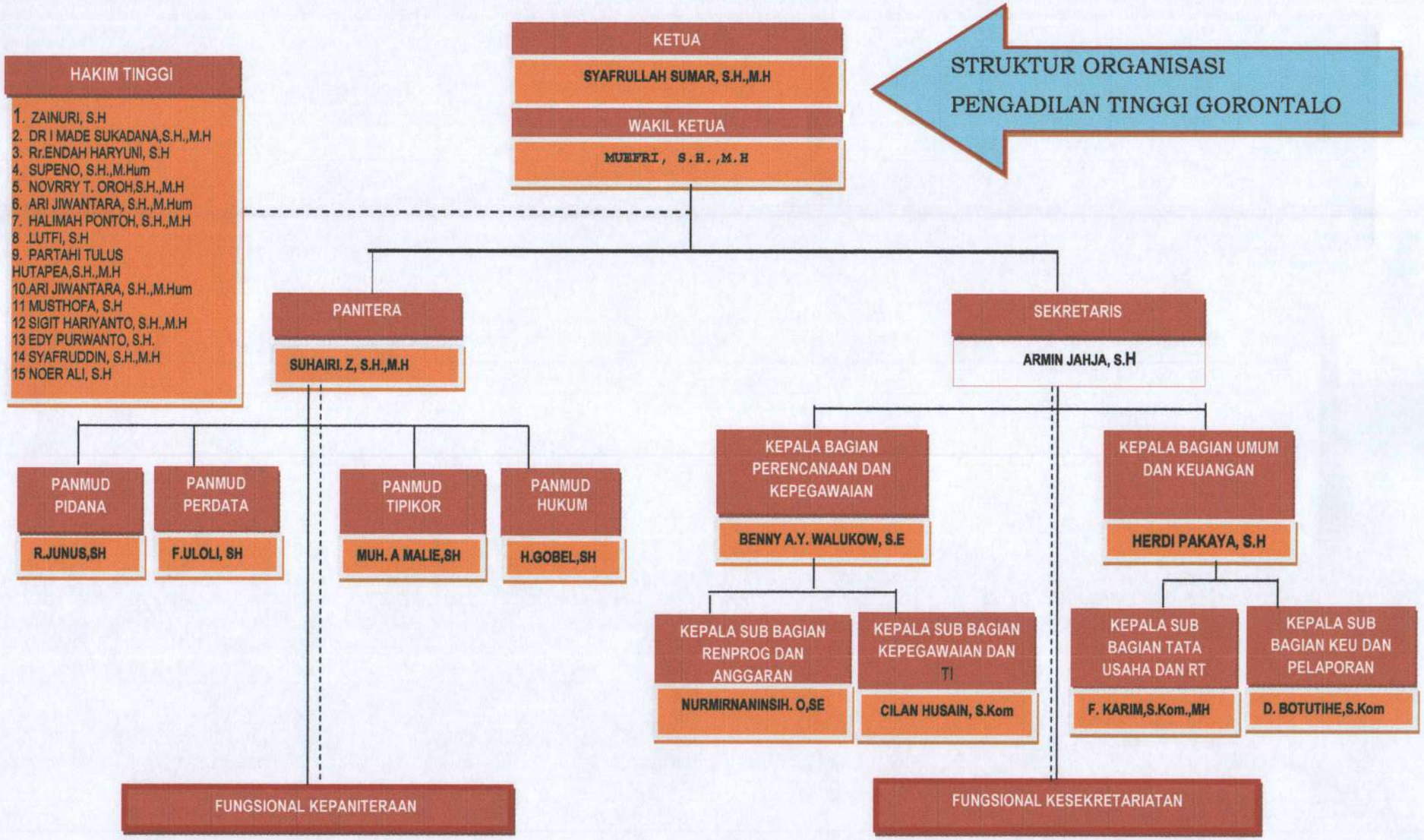

Lampiran : struktur organisasi PT.Gorontalo

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1) SK TIM PENYUSUNAN LKjIP
2) Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Gorontalo

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NOMOR : W20-U/1627/0T.01.2/12/2019

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

b. Bahwa untuk menindaklanjuti Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Pengadilan Tinggi Gorontalo membentuk Tim untuk menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam bentuk Surat Keputusan;

c. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tinggi GorontalO

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republ;ik Indonesia Nomor 4614) ;

b. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 1604/SEK/ot.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian dokumen SAKIP

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam jalur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Kedua : Nama- nama yang dimaksud dalam dictum 1 (satu) tersebut bertugas sebagai Tim Penilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 17 Desember 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

H. SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H.

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NOMOR : W20-U/ 1627 /OT.01.2/12/2019
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Suhairi Z, S.H.,M.H	Panitera	Ketua
2	Armin Jahja, S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua
3	Benny AY. Walukow, S.E	Kabag. Perencanaan dan kepegawaian	Sekretaris
4	Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, S.H.	Wapan	Anggota
5	Herdi Pakya	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
6	Rasuna Junus, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
7	Hasni Van Gobel, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
8	Fony Uloli, S.H	Panmud Perdata	Anggota
9	Muh. Aldrin Malie, S.H.	Panmud TIPIKOR	Anggota
10	Fandry Yuniarti Karim, S.Kom.,M.H	Kassubag RT dan TU	Anggota
11	Deddy s. Botutihe, S.Kom	Kassubag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
12	Cilan Husain, S.Kom	Kassubag Kepegawaian dan TI	Anggota
13	Nurminanigsi Otoluwa	Kassubag Renprog dan Anggaran	Anggota
14	Nurafni saluwa, S.E.	Staf	Operator

15	Hijri Maharani Lebi, S.Kom	Staf	Operator
16	Santi Iswari, S.E	Staf	Operator
17	Vivien Novita Tahir, S.Akun	Staf	Operator
18	Zulham Djafar	Staf	Operator
19	Ivan Ombuh, S.E	Staf	Operator

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 17 Desember 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

H. SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI GORONTALO

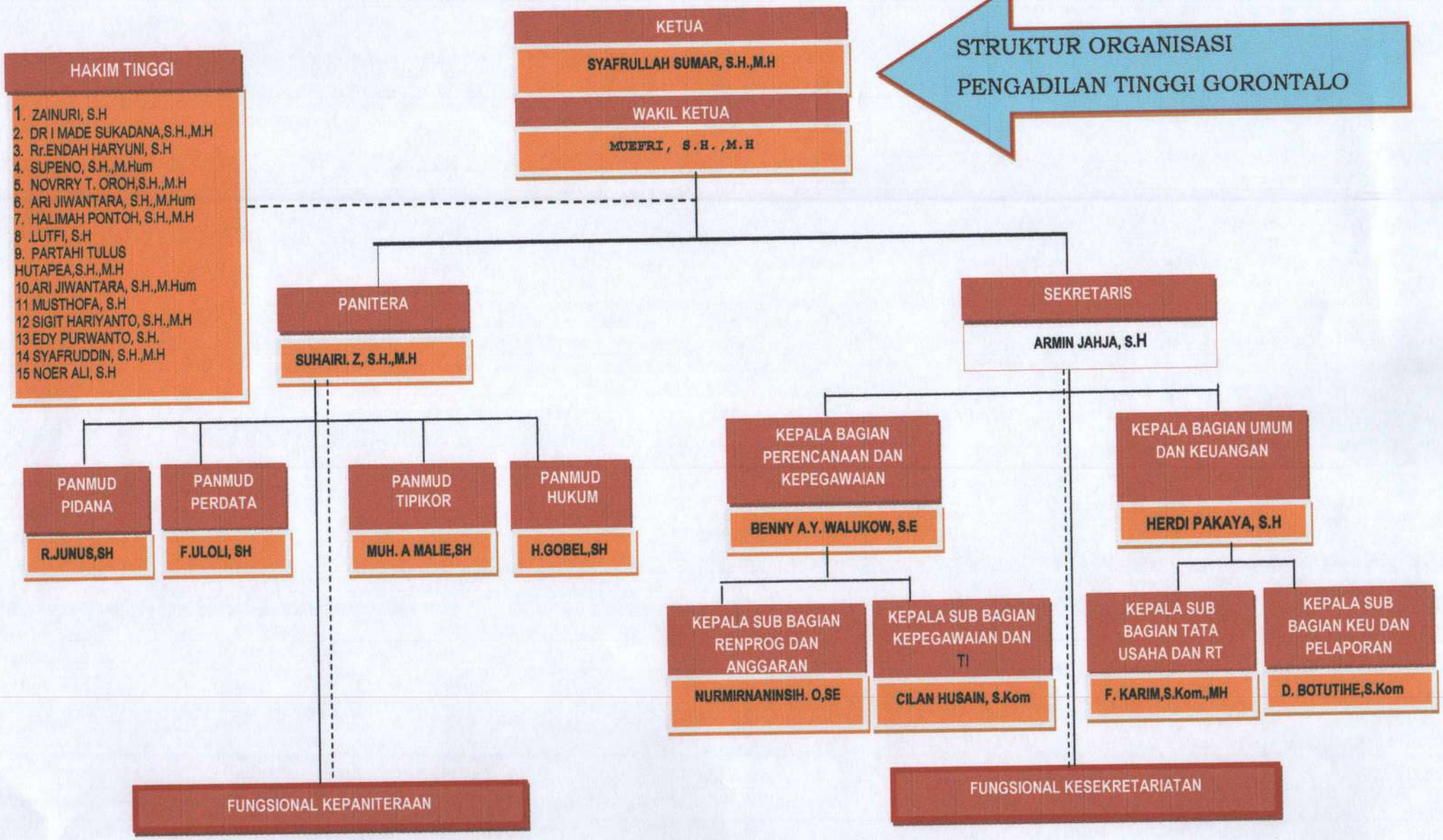

Lampiran : struktur organisasi PT.Gorontalo